

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang berbasis dan lebih fokus di sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan. Hal ini didukung dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Strategi pengembangan pada sektor pertanian di pedesaan merupakan hal kongkrit menuju Indonesia yang mandiri, adil dan merata, pada saat ini di era pemerintahan Bapak Joko Widodo tujuan pembangunan di millennium pertama adalah jumlah penduduk yang masih berada dalam kelaparan serta kemiskinan ekstrim harus berkurang. Dalam hal ini, tujuan tersebut telah tercapai dibuktikan oleh pemerintah dengan setengah penduduk terbebas dari kelaparan dan kemiskinan.

Badan Ketahanan Pangan dengan *World Food Programme* (WFP) tahun 2012 mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) yang menunjukkan Indonesia dari 398 kabupaten di 32 provinsi yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten 15% rentan kerawanan pangan, 136 kabupaten 34% tingkat kerentanan sedang, dan 204 kabupaten 51% tergolong dalam kabupaten tahan pangan. (Badan Ketahanan Pangan, 2016) masalah yang terjadi pada negeri ini 50% adalah pangan sehingga rawan pangan menjadi masalah yang sangat krusial pada pembangunan serta pertumbuhan

ekonomi karena pangan tidak bisa terlepas dari manusia dan menjadi kebutuhan primer sehingga mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam meningkatkan perekonomian pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan pada periode 2015-2019 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang difokuskan dengan meningkatkan ketersediaan pangan, memantapkan distribusi pangan, mempercepat penganekaragaman pangan serta melakukan pengawasan keamanan pangan segar. Hal ini berlandaskan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya serta memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Hal ini juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 mengenai ketahanan pangan dan juga gizi sebagai dasar dalam melaksanakan peraturan Undang – Undang No 18 Tahun 2012 mengenai ketahanan pangan.

Pangan merupakan sumber energi dan protein yang digunakan untuk menjaga seseorang untuk hidup sehat dan produktif serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketahanan pangan adalah ketika terjaminnya orang untuk hidup tanpa ancaman kelaparan Majumdar & Bala & M.A. Hossain (2012), namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan sebaliknya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan akan mengakibatkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan serta kemiskinan hingga

saat ini masih menjadi masalah yang krusial dan utama di Indonesia. Kemiskinan dan kerawanan pangan berkaitan erat apabila negara tersebut banyak masyarakat miskin pasti terjadi juga kerawanan pangan. Menurut penelitian Aris slamet widodo (2016) kerawanan pangan mempunyai korelasi positif dengan kemiskinan. Menurut BPS, Data Dan Informasi Kemiskinan (2015) menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan pada bulan September 2015 di Indonesia mencapai 28,51 juta orang sekitar 11,13% berkurang menjadi sebesar 0,08 juta orang apabila dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2015 yang berjumlah 28,59 juta orang atau sekitar 11,22%.

Hasil penelitian Prishardoyo dan Sari (2009) mengenai kerawanan pangan variabel pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif mempunyai pengaruh terhadap kerawanan pangan pada rumah tangga miskin, lokasi penelitian berada di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dalam hasil penelitiannya menguatkan bahwa pangkal terjadinya kerawanan pangan merupakan kemiskinan, penduduk miskin dalam mengkonsumsi makanan umumnya mengkonsumsi makanan yang rendah zat gizinya sehingga mengakibatkan daya tahan tubuh rendah serta taraf kesehatan masyarakat kebawah juga rendah dan akhirnya mengakibatkan produktivitas tingkat pekerjaan rendah serta mengakibatkan tingkat pendapatan rendah. Dalam situasi seperti ini kegiatan yang mengakibatkan menurunnya tingkat konsumsi menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan akan pangan. Kerawanan pangan dapat diukur dari konsumsi energi protein. Menurut Badan Ketahanan Pangan (2016)

presentase yang dianjurkan dalam mengkonsumsi energi protein sebesar 2000 kkal per kapita dan 52 gram protein per kapita per hari apabila dibawah yang dianjurkan maka masyarakat tersebut mengalami masalah kerawanan pangan.

Angka tingkat kerawanan pangan menggambarkan tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan akan gizi yang diukur berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hasil SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Masyarakat) yang dilaksanakan BPS berguna untuk mengukur tingkat kerawanan pangan dimana kecukupan konsumsi dihitung dari angka kecukupan konsumsi penduduk perkapita perhari. Persentase rawan pangan dilihat berdasarkan angka kecukupan gizi (AKG) daerah dengan cara menghitung dengan menjumlahkan penduduk dan konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Angka rawan pangan Indonesia pada tahun 2012-2016 ditunjukkan dari tabel berikut:

**Tabel 1. 1**  
Angka Rawan Pangan Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan (<70% AKG)	%	Jumlah Penduduk Rawan Pangan (70%-89,9% AKG)	%	Jumlah Penduduk Tahan Pangan (>=90% AKG)	%
2012	47,842,490	19,52	80,832,494	32,97	116,463,438	47,51
2013	46,399,355	18,68	84,091,618	33,84	117,956,185	47,48
2014	43,739,341	16,94	84,823,188	33,16	122,825,321	49,9
2015	33,030,182	12,96	72,813,600	28,57	149,052,869	58,48
2016	32,734,074	12,69	70,039,317	27,16	155,116,930	60,15

Sumber: Data diolah dari (Badan Pusat Statistika, 2017)



Sumber: (Badan Pusat Statistika, 2017)(Data diolah)

**Gambar 1. 1**

Grafik Perkembangan Kerawanan Pangan Indonesia Tahun 2012-2016

Keterangan:

1. Sangat rawan : Konsumsi Kalori per kapita per hari kurang dari  $< 70\%$  dari AKG (Angka Kecukupan Gizi)
2. Rawan Pangan : Konsumsi Kalori per kapita per hari diantara  $70\% - 90\%$  dari AKG (Angka Kecukupan Gizi)
3. Tahan Pangan : Konsumsi Kalori per kapita per hari lebih dari  $> 90\%$  dari AKG. (Angka Kecukupan Gizi)

Melihat perkembangan kerawanan pangan di Indonesia yang mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir ini. Jumlah penduduk sangat rawan dalam 5 dekade terakhir mengalami penurunan namun tidak begitu besar pada akhir tahun 2015 ke 2016 hanya sekitar 0,27%, padahal di tahun 2012 menuju 2013 jumlah penduduk sangat rawan pangan mengalami penurunan sebesar 0,84% dan ditahun 2013 menuju 2014 mengalami penurunan yang sangat tinggi sebesar 1,74% sama halnya tahun 2014 menuju 2015 mengalami peningkatan berupa penurunan sebesar 3.98% berbeda tahun 2015 menuju tahun 2016 hanya mengalami penurunan jumlah penduduk sangat rawan pangan sebesar 0,27%. Jumlah penduduk rawan pangan juga mengalami fluktuatif pada tahun 2012 menuju 2013

mengalami peningkatan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 0,87%, namun pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan sebesar 0,68% dan seterusnya mengalami penurunan hingga tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,41%, dan pada daerah yang tahan pangan di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan, di tahun 2016 jumlah penduduk yang tahan pangan sudah mencapai 60,15%.

Menurut Dewan Ketahanan Pangan (2015) ada beberapa masalah utama yang terjadi pada Ketahanan Pangan Nasional yaitu:

1. Kerawanan pangan, kemiskinan dan ketimpangan
2. Laju konversi lahan produktif yang sangat cepat untuk pemukiman
3. Ketergantungan konsumsi pangan terhadap beras sangat tinggi
4. Akses sebagian masyarakat terhadap sumberdaya produktif sangat terbatas
5. Distribusi pangan yang belum merata
6. Lebih dari setengah jumlah kelompok rawan pangan adalah petani kecil dan buruh tani.

Sementara itu menurut Badan Ketahanan Pangan (2016) permasalahan pangan pada tataran rumah tangga meliputi:

1. Daya beli masyarakat rendah terhadap pangan
2. Keterbatasan akses terhadap pangan
3. Kerawanan pangan kronis

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat di mulai dari tataran yang terkecil yaitu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, hal ini merupakan salah satu upaya penanganan masalah kerawanan pangan rumah tangga. Indikator rawan pangan menurut Dewan Ketahanan Pangan, 2015 yaitu

rasio konsumsi normatif perkapita, proporsi penduduk dibawah tingkat garis kemiskinan, rumah tangga tanpa akses listrik, jalan dan tingkat buta huruf serta angka harapan hidup, tingkat kematian pada bayi, berat badan balita dibawah normal, akses pada air bersih dan jarak rumah tangga yang lebih 5 km dari puskesmas namun dengan 10 indikator tersebut status rawan pangan yang mutlak untuk daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, jadi indikator yang digunakan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di daerah tersebut.

Masalah rawan pangan juga terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana 494.940 jiwa mengalami masalah kemiskinan. Dibandingkan September tahun 2015 hal ini mengalami kenaikan sebesar 9.380 jiwa yaitu sebesar 485.560 Jiwa. Garis kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kenaikan, menurut Badan Pusat Statiska Daerah Istimewa Yogyakarta naiknya garis kemiskinan ini terjadi di perkotaan maupun pedesaan, di perkotaan pada Maret 2016 naik 4,89% dibandingkan Maret 2015, dan di pedesaan naik sebesar 6,10%. Garis kemiskinan menggambarkan nilai kebutuhan dasar minimum dan makanan penduduk daerah per kapita per bulan. Pada Maret 2016 garis kemiskinan sebesar Rp 354.084 naik 5,42% dibandingkan bulan Maret Tahun 2015 sebesar Rp 335.886 per kapita per bulan. Sumbangan terbesar pada angka kemiskinan ialah makanan.

Dalam kontribusi komoditas ada lima hal yang memberikan pengaruh besar pada garis kemiskinan, yakni beras, rokok, telur ayam, daging ayam serta mie instant dan untuk non makanan yang memberikan dampak pada garis kemiskinan di kota dan desa adalah biaya perumahan serta BBM dan listrik. Mereka yang

berada pada garis kemiskinan merupakan orang-orang yang berada pada situasi rawan pangan. Kondisi sosial ekonomi mereka tergolong miskin dan sulit untuk diangkat. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 menggambarkan daerah tersebut mengalami daerah rawan pangan dengan melihat 3 (tiga) Indikator:

1. Ketersediaan Pangan (*food availability*)

Tersedianya pangan secara fisik pada daerah yang didapatkan dari produksi domestik, impor ataupun bantuan pangan tapi ketersediaanya lebih diutamakan dari produksi domestik yaitu jumlah produksi harus lebih besar daripada jumlah penduduk.

2. Kemiskinan (*poverty*)

Kemampuan rumah tangga dalam membeli komoditas pangan pokok, atau disebut daya beli rumah tangga pokok dalam mencukupi kebutuhan pangan

3. Kesehatan dan Gizi (*health and nutrition*)

Kesehatan dalam pangan yaitu kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang sehat dan bergizi dan status gizi ialah *outcome* yang berasal dari ketahanan pangan yang mana memiliki definisi sebagai cerminan dari kualitas hidup seseorang baik atau buruk.

Berdasarkan ketiga indikator diatas menurut Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta (2016) pada tahun 2015 terdapat 20 desa yang terindikasi desa rawan pangan dan tahun 2016 mengalami penurunan desa rawan pangan menjadi 16 desa rawan pangan yang dapat dilihat dari peta desa rawan pangan dibawah ini.



**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi DIY Tahun 2016**

Kabupaten	Tahun								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Bantul	18	7	17	10	10	6	5	3	3
Kulon Progo	35	33	38	36	34	27	12	9	6
Gunung Kidul	77	42	38	38	24	22	7	7	7
Sleman	7	12	10	10	12	5	2	0	-
Total	137	94	103	94	80	60	26	20	16

Sumber: Laporan Dinas Pertanian DIY, 2016 (Diolah)

Pada Tabel 1.2 peta rawan pangan dan gizi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 16 desa yang mengalami masalah rawan pangan. Desa-desa tersebut tersebar pada Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul. Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kestabilan desa rawan pangan yaitu 7 (tujuh) desa yang terindikasi rawan pangan begitu juga Kabupaten Bantul dari tahun 2015 sampai tahun 2016 yaitu 3 (tiga) desa yang terindikasi rawan pangan namun berbeda dengan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu daerah Kabupaten yang mempunyai daerah rawan pangan yang masih besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pada tahun 2015 terdapat 9 (Sembilan) desa rawan pangan dan 2016 mengalami penurunan menjadi 6 (enam) desa rawan pangan. Oleh karena itu dalam mengurangi desa rawan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan Kulon Progo DPRD Komisi IV mencanankan Perda Ketahanan Pangan Kulon Progo sebelum Perda dibuat diperlukan naskah akademik yaitu realita, fakta yang terjadi dilapangan sehingga peneliti memfokuskan penelitian pada Ketahanan Pangan Kulon Progo untuk membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Ketahanan Pangan Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo mempunyai luas wilayah sebesar 58.627,5 ha (586.28 km<sup>2</sup>). Menurut data dari Badan Pusat Statistika Kulon Progo (2016) jumlah penduduk Kulon Progo tahun 2016 tercatat 445.293 jiwa dengan kepadatan penduduk 759 jiwa/km<sup>2</sup> atau 12,1% dari jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 3.679.176 jiwa, dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan akan pangan juga akan semakin meningkat, dengan kata lain terjadi peningkatan konsumsi, sama halnya menurut teori Malthus dalam buku Todaro, Michael P.; Smith, Stephen C (2012) bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur yang artinya sumberdaya penopang hidup konsumsi pangan yang mengikat menurut deret hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Peningkatan permintaan terhadap bahan-bahan pangan strategis tidak disertai dengan peningkatan produksi pangan di Kabupaten Kulon Progo akan mengakibatkan masalah rawan pangan.

Masalah rawan pangan yang terjadi pada Kulon Progo Menurut Sugiri (2017) terdapat 3(tiga) indikator yang menentukannya yakni:

1. Ketersediaan Pangan
2. Akses atau Kemiskinan
3. Gizi buruk

Maman Sugiri menyatakan: “Permasalahan desa rawan pangan Kulon Progo ini hanya disebabkan oleh jumlah produksi yang lebih kecil sehingga tidak

memenuhi kebutuhan penduduk serta masalah kemiskinan yang masih tinggi.”  
(hasil wawancara tanggal 17 Oktober 2017)

Kemisikinan yang terjadi pada rumah tangga miskin mempunyai banyak keterbatasan baik pangan, kesehatan, dan sulitnya menemukan pekerjaan yang layak. Akibatnya banyak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan sehingga melahirkan generasi rumah tangga miskin baru yang diwariskannya. Umumnya mereka merasa secara eksklusif mempunyai kelembagaan sendiri yang mereka bangun terpisah dari kelembagaan lain. Kelembagaan yang dibangun berskala sempit, sumberdayanya yang terbatas, serta hubungan antar lembaga lemah (*interlinkage institution*). Sehingga masyarakat miskin dicirikan oleh, lemahnya akses terhadap jaringan ekonomi (untuk mencukupi kebutuhan pangan), jaringan sosial yang ada dan kesehatan yang umumnya disebabkan karena rumah tangga miskin memiliki banyak keterbatasan dalam mencari pekerjaannya sehingga hal ini dapat menyebabkan daerah tersebut menjadi daerah rawan pangan.

**Tabel 1. 3**

Data Desa Kulon Progo yang Terindikasi Rawan Pangan Tahun 2016

No	Kabupaten	Nama Desa
1	Kulon Progo	Giri peni
2		Tuksono
3		Hargotirto
4		Giripurwo
5		Purwoharjo
6		Sidoharjo

Sumber : Laporan Dinas Pertanian DIY, 2016 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas Kulon Progo pada tahun 2016 terdapat 6 (enam) desa yang mengalami rawan pangan antara lain: Giri Peni, Tuksono, Hargotirto, Giripurwo, Purwoharjo, Sidoharjo. Hal ini mengalami penurunan desa

rawan pangan yang awalnya pada tahun 2015 terdapat 9 (Sembilan) desa rawan pangan sehingga Kulon Progo mempunyai desa rawan pangan terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Menurut Maman Sugiri, 2017 keberhasilan penurunan desa rawan pangan salah satunya disebabkan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sehingga dapat mengurangi 3 (tiga) desa yang mengalami rawan pangan antara lain: Hargowilis, Ngargosari dan Kelurahan Wates.

Hal ini yang perlu dikaji mengenai permasalahan rawan pangan daerah Kulon Progo padahal pengembangan pemberdayaan ketahanan pangan selain optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL sangat banyak yakni Desa Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Kebijakan Harga Pangan melalui Koperasi, TOMIRA (Toko Milik Rakyat), Bulog dan lain-lain namun hanya 3(tiga) desa yang mengalami keberhasilan dan 6(enam) desa yang masih mengalami rawan pangan serta 2 (dua) desa dalam posisi waspada rawan pangan yaitu Desa Bendungan dan Sendangsari Dinas Pertanian Kulon Progo (2016)

Berdasarkan wawancara dengan *stakeholder* pada instansi-instansi terkait dan masyarakat rumah tangga miskin di desa rawan pangan dapat disimpulkan bahwa faktor status sosial ekonomi yang meliputi pendidikan dan pendapatan yang merupakan salah satu identifikasi yang menyebabkan desa rawan pangan tersebut, dan juga program kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan yang dirasa belum efektif atau hanya sebuah paradok dari kebijakan ketahanan pangan namun hal ini yang harus diteliti mengenai sebuah kebijakan ketahanan pangan

agar tidak seperti ibarat membuang garam pada laut yang artinya membuat kebijakan tidak sesuai dengan potensi daerah sehingga mengakibatkan kesia-siaan sehingga masyarakat menjadi terpuruk dalam kemiskinan karena tidak cocoknya kebijakan dengan daerah lokal.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap ketahanan pangan salah satunya yang dilakukan oleh Damayanti dan Khoirudin (2016) dalam jurnal analisis faktor - faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani menunjukkan pengaruh pendapatan terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul yang menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan diikuti dengan ketahanan pangan meskipun kemungkinan peningkatan probabilitas pendapatan hanya sebesar 0,00% dan semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga diikuti dengan ketahanan pangan juga.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Darwis, Supriyati, dan Rusastra (2013) mengenai analisis dampak desa mapan terhadap tingkat ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga bahwa Pulau Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang lebih rendah, Desa Mapan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap peningkatan rumah tangga dengan katagori “sejahtera”, yaitu dari 1,30% menjadi 20,13%. Di luar Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Desa Mapan memberikan dampak positif yang relatif signifikan terhadap penurunan proporsi rumah tangga dengan katagori “sangat miskin” dan “miskin”, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan yang besar pada rumah tangga yang katagori “kurang sejahtera” dari 21,88% menjadi 43,28%.

Dari analisis tingkat nasional dapat disimpulkan bahwa, Desa Mapan memberikan dampak positif seperti: terjadi penurunan jumlah rumah tangga miskin, dan pada saat bersamaan terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan rumah tangga sejahtera. Secara nasional rumah tangga “sangat miskin” menurun dari 15,54% menjadi 4,99% dan rumah tangga “sejahtera” meningkat dari 1,23% menjadi 10,33%.

Oleh karena itu dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan Pada Rumah Tangga Miskin Di Desa Rawan Pangan Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti meneliti 3(tiga) desa rawan pangan dari 6 (enam) desa rawan pangan dengan meninjau melalui interview kepada masyarakat dan kepala desa sehingga disimpulkan dari 6(enam) desa rawan pangan hanya 3 (tiga) desa yang memenuhi klasifikasi yaitu:

1. Desa yang sudah mendapatkan program kebijakan ketahanan pangan namun belum ada perubahan yang signifikan didalamnya.
2. Desa dengan presentasi jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi di desa rawan pangan Kulon Progo.
3. Desa dengan penentuan lokasi, yaitu area persawahan, area perbukitan, area pegunungan

6 (Enam) desa rawan pangan yang memenuhi klasifikasi peneliti diatas hanya ada 3 (tiga) desa rawan pangan yang ditentukan yaitu Desa Hargotirto

Kecamatan Kokap, Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh, dan Desa Giripeni Kecamatan Wates.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi ketahanan pangan pada rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana strategi pengembangan ketahanan pangan pada rumah tangga miskin berbasis status sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Kondisi ketahanan pangan pada rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menemukan strategi yang tepat dalam menanggulangi permasalahan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang mengenai strategi pengembangan Ketahanan Pangan.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan, sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.